

IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI SULA WESI UTARA

Oleh

**MONICA RAHEL TOMBUKU
NIM. 090811014**

ABSTRAK

According to the instruction law no.40 years 2009, sector regulations north celebes province no.3 years 2008 and government north celebes regulations no.48 years 2008, then youth and sportdepartement north celebes province to determine various prioritation program in younger service sector but in the implementation stril find various problems and constrain. This research direction will know how implementation program younger services youth and sport departement of north celebes province.

This research is using qualitative method. The program of implementation younger service focused to four elements/program is the same manner as to proposed in implementation model from Edward III is comunication, capacity source disposition, and bereaucracy stucture. Data source (informant) that has interview 13 people consist or 8 people official / employee youth and sport departement north celebes province and 5 peoples leadership / manejer from miles and huberman.

The research showed; 1. Program youger service has not communicated / commitment with good; 2. Capacity source for implementation avaible with incomplete especially human of capacity source / employee; 3. disposition (socialization and consistent employee / execute high enough ; and 4. Bureucracy structure (mechanics and procedur is simple enough, and task deviding and cleary responsibility)

Based on the output research attractived conclusions that all programs youngerservice the detemined youth and sport departement north celebes province can implemented not maximal, especially in comunication sector.

Based on conclusions research output suggested : (1) All of the importantaspect in policy implementation draft / younger services program efective method (communication, capacity source, disposition and structure), still need increased; (2) communication between programmer and program receiver must be fixed and estimation alocation for younger services programneed increased so that younger service programs can reach out all youth organization exist in north celebes province.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa semua program pelayanan kepemudaan yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara dapat diimplementasi dengan cukup baik dan berhasil.

keywords : policy implementation/programs, younger services.

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional

bangsa Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subyek bagi tercapainya tujuan nasional.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian (UU. No.40 Tahun 2009).

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008,

merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga. Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara antara lain adalah melaksanakan pelayanan kepemudaan di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam UU No.40 Tahun 2009 tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008, bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda yang meliputi urusan di bidang organisasi dan kaderisasi kepemudaan, urusan pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda, dan urusan pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas anak.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara pada beberapa tahun terakhir ini menetapkan beberapa program di bidang kepemudaan yaitu : (1) program

pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda; (2) program peningkatan peranserta kepemudaan; (3) program pelayanan kepemudaan. Program pelayanan kepemudaan yang ditetapkan adalah : (1) pengembangan kepedulian pemuda; (2) pengembangan kewirausahaan pemuda; (3) pemberdayaan organisasi kepemudaan, (4) pengembangan kepanduan; dan (5) peningkatan wawasan pemuda. Pendanaan program tersebut adalah bersumber dari APBD dan APBN pada setiap tahun anggaran.

Implementasi program pelayanan kepemudaan tersebut harus didukung oleh tersedianya berbagai faktor secara memadai. Dari prasarvei menunjukkan adanya beberapa permasalahan dan kendala dalam implementasi program yang sudah ditetapkan seperti belum memadainya dana yang tersedia untuk setiap program baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Disamping itu, permasalahan atau kendala lain dalam implementasi program pelayanan kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara adalah komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak-

pihak terkait belum berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Permasalahan ataupun kendala tersebut dapat menyebabkan program pelayanan kepemudaan yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif dan belum dapat mencapai hasil maksimal. Dari studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi dan tingkat capaian tujuan dan sasaran program pelayanan kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara belum mencapai hasil maksimal. Hal tersebut nampak baik dalam implementasi program/kegiatan pengembangan kepedulian pemuda melalui kegiatan sarjana penggerak pembangunan pedesaan, program/kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan pemuda dan pengembangan kelompok wirausaha muda, program/kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui pemberian bantuan organisasi kepemudaan, maupun program/kegiatan pemberdayaan kepanduan melalui kegiatan bantuan kepada kwartil daerah dan kwartil cabang. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa program-program atau kegiatan-

kegiatan pelayanan kepemudaan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan belum mencapai target hasil yang telah ditetapkan. Namun sejauh mana kebenaran informasi awal tersebut tentu masih harus dibuktikan melalui suatu penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi program pelayanan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Utara, maka metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006). Penelitian

kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2010).

B. Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konseptual adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 2000).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program pelayanan kepemudaan, yaitu program pelayanan kepemudaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi : pengembangan kepedulian pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan kepanduan, dan peningkatan wawasan kepemudaan. Implementasi program

pelayanan kepemudaan tersebut dilihat dilihat dari empat faktor seperti yang dikemukakan dalam model implementasi kebijakan dari Edward III yaitu :

1. Komunikasi, yaitu komunikasi antara pelaksana program (pemerintah daerah propinsi/dinas pemuda dan olahraga) dengan kelompok sasaran (pemuda, organisasi kepemudaan).
2. Sumberdaya, yaitu tingkat kecukupan atau memadainya sumberdaya manusia pelaksana dan sumberdaya financial yang tersedia disediakan oleh pemerintah daerah propinsi untuk implementasi program pelayanan kepemudaan;
3. Disposisi, yaitu karakteristik yang dimiliki para pelaksana program pelayanan kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara, terutama adalah menyangkut aspek-aspek : kejujuran, komitmen, dan tingkat demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu menyangkut mekanisme (standar operating prosedur atau SOP) dan struktur organisasi pelaksana program pelayanan

kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara.

C. Sumber Data (Informan Penelitian)

Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari dua unsur yaitu : unsur penyelenggara pelayanan kepemudaan (pegawai pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara), dan unsur penerima pelayanan atau kelompok sasaran (pemuda).

Jumlah seluruh sumber data (informan) dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat/pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara, dan 5 orang dari unsur organisasi kepemudaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode pengumpulan data tersebut digunakan dengan pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini bertujuan menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, dan (3)

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2006).

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan para informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan lebih dahulu, dan wawancara mendalam (*indepth interview*) guna mendalami data dan informasi yang diperoleh.
2. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena/peristiwa yang menjadi objek penelitian.
3. Studi Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder atau data yang telah tersedia pada kantor lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sieddel

(dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini

dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pelayanan kepemudaan tersebut dilihat atau diamati dari empat faktor penting di dalam pencapaian implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan dalam teori/model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk mengungkap bagaimana implementasi program pelayanan kepemudaan tersebut, dilakukan wawancara terhadap pimpinan dan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara (sebanyak 8 orang), dan pimpinan/pengurus beberapa organisasi kepemudaan (sebanyak 5 orang). Hasil wawancara

dan pembahasannya dikemukakan sebagai berikut :

a. **Komunikasi**

Seperti yang dikatakan dalam teori/model implementasi oleh Edward III, bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para kelompok sasaran (target group). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (Edward III *dalam Nugroho, 2009*). Komunikasi dalam rangka implementasi program pelayanan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara dilihat dari dua aspek

yaitu : pertama adalah metode dan sarana komunikasi/sosialisasi yang digunakan, dan kedua adalah intensitas komunikasi dilakukan.

Pernyataan para informan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa komunikasi yang dikembangkan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara selama ini dalam rangka implementasi kebijakan/program pelayanan kepemudaan nampaknya belum cukup maksimal dan tidak efektif. Berbagai hal yang berkenaan dengan kebijakan/program pelayanan kepemudaan dikomunikasikan (disosialisasikan atau dipublikasikan) dengan tidak cukup jelas kepada sasaran target baik secara langsung melalui tatap muka atau pertemuan dengan organisasi kepemudaan (penerangan, ceramah, penerangan/ penyuluhan) maupun secara tidak langsung yaitu melalui media masa seperti penerbitan dan penyebaran brosur/leaflet, surat kabar, radio, televise, dan situs internet.

b. Sumberdaya (resources)

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan atau program tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya

yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor atau pelaksana kebijakan/program, yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan atau program (Edward III dalam Nugrono, 2009).

Dalam penelitian ini kemampuan sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat dari kecukupan jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara untuk implementasi tugas pelayanan; sedangkan kemampuan sumberdaya manusia secara kualitas dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang

berkenaan dengan tugas pekerjaan pelayanan kepemudaan.

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan sumberdaya manusia untuk implementasi program pelayanan kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara baik secara kuantitas maupun kualitas dirasakan sudah memadai. Kemampuan SDM pegawai yang sudah memadai tersebut menyebabkan implementasi program pelayanan kepemudaan yang ditetapkan dapat berjalan lancar dan berhasil. Namun demikian, karena kemampuan sumberdaya finansial masih kurang memadai sehingga program dan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan belum dapat menjangkau semua organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Utara.

c. **Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan/program tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda

dengan si pembuat kebijakan maka proses implementasi sebuah kebijakan/program akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III bahwa disposisi (*disposition*) merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan/program yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen dan konsistensi dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari pembuat kebijakan atau *policy maker* (Nugroho, 2009).

Hasil wawancara dengan semua informan mengenai kesediaan dan komitmen/konsistensi para pegawai pelaksana tersebut setidaknya-tidaknya dapat menunjukkan bahwa tingkat disposisi yang cukup tinggi para pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka implementasi program pelayanan kepemudaan sesuai dengan arah kebijakan atau ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan.

d. **Struktur Birokrasi**

Menurut Edward-III bahwa selain faktor komunikasi, sumberdaya dan disposisi, maka struktur birokrasi

merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi suatu kebijakan/program publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (*standar operating procedur* atau SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa “para pelaksana kebijakan/program mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja” (Rusli, 2013).

Berdasarkan pernyataan para informan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi (SOP serta pembagian tugas dan tanggung jawab) di Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara sudah ditata dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan struktur organisasi yang didesain secara ringkas, tidak berbelit dan bersifat fleksibel, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas diantara unit/satuan organisasi yang

ada sehingga implementasi program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pelayanan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pripinsi Sulawesi Utara. Dengan berlandaskan pada teori/model implementasi dari Edward-III, berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Diantara keempat teori Edward-III untuk program pelayanan kepemudaan masih ada beberapa hal yang masih perlu di perbaiki dan ditingkatkan, yaitu dari komunikasi antara pemerintah dan target sasaran.
2. Implementasi program pelayanan kepemudaan harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang memadai, dan dari survey lapangan dan dari hasil wawancara dari beberapa pihak menunjukkan bahwa program pelayanan kepemudaan masih kekurangan dana sehingga mengalami beberapa kendala

- dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.
3. Adanya komunikasi yang kurang baik, ketersediaan sumberdaya manusia (pegawai) yang cukup memadai, disposisi atau komitmen dan konsistensi pegawai yang cukup tinggi, dan struktur birokrasi pelaksana yang efisien tersebut sehingga program pelayanan kepemudaan yang ditetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara dapat diimplementasi dengan cukup baik namun masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Semua aspek-aspek penting dalam rangka implementasi kebijakan/program pelayanan kepemudaan secara efektif (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi), masih perlu ditingkatkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Utara. Terutama di bidang komunikasi.
2. Alokasi anggaran untuk program pelayanan kepemudaan perlu ditingkatkan sehingga program pelayanan kepemudaan dapat menjangkau seluruh organisasi pemuda yang ada di tingkat propinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S, 1996, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002, *Kebijakan Publik :Konsep dan Strategi*,
- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, W, N, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan, Yogyakarta : UGM-Prss.
- Indiahono, D. 2010, *Perbandingan Administrasi Publik :Model, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta, Gava Media.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :*

- Konsep, Teori, Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kurniawan, A., 2004, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : PT.Pembaharuan.
- Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Lukman, S., 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, STIA LAN Press.
- Moenir,H.A.S., 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, L, J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Nugroho, Riant.2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Rusli,B. 2013, *Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung : Hakim Publishing.
- Poerwadarminta,S. 1980, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Singarimbun, M. dan Sofian Effendy, 2000, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Gramedia.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Usman dan Setiady, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Erlangga.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.
- Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara.